

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh Berbasis NGO: Studi Kasus Kampung Dupak Magersari, Kota Surabaya
Laurensius Raka Yudha Marvel Riskyawan¹, Shinta Permana Putri²

¹*Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka*

²*Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka*

E-mail: 043847158@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Kampung Dupak Magersari merupakan sebuah kawasan permukiman kumuh yang terletak di Kota Surabaya. Sejumlah masyarakatnya hidup berdampingan di sepanjang rel kereta api yang mana tidak memiliki legalitas atas tanah yang ditempati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program, stakeholder terlibat, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Arsitek Komunitas (Arkom) dalam penanggulangan permukiman kumuh di Kampung Dupak Magersari Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui proses wawancara yang dilakukan dengan pengelola Arkom Jatim serta perwakilan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Teknik analisis yang digunakan yakni content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Arkom dalam penanggulangan permukiman kumuh seperti program kampung berketahanan, reformasi agrarian perkotaan, serta program perumahan gotong royong. Dalam hal ini, Arkom selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berkolaborasi dengan stakeholder lain seperti pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat sebagai pelaku utama dalam penanggulangan permukiman kumuh. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan diawali dengan pembongkaran pola pikir masyarakat, pembentukan paguyuban, pemetaan potensi dan masalah kawasan, serta penyusunan rencana partisipatif. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh baik dalam penanggulangan kawasan permukiman kumuh yang melibatkan multi-aktor sekaligus dapat berimplikasi dalam pelaksanaan kebijakannya di Indonesia.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Pemberdayaan Masyarakat, Arkom Jatim, *Community Development, Collaborative Governance*.

1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merefleksikan buruknya kondisi infrastruktur fisik seperti bangunan yang di bangun dalam bentuk bangunan semi permanen, luas bangunan yang berukuran kecil dan sempit, tidak ada pemisah antara ruang pribadi dan ruang bersama, dan tidak adanya sertifikat kepemilikan lahan dari pemerintah untuk masyarakat (Nursyahbani, Pigawati, 2015). Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknis semata, seperti memperbaiki rumah atau membangun jalan. Harus pula dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, meningkatkan pendapatan keluarga, memperbaiki mutu pendidikan, dan menanamkan nilai-nilai budaya yang mendorong perilaku hidup sehat dan bersih. Selain itu, penanganan permukiman kumuh memerlukan kebijakan lintas sektor yang melibatkan koordinasi antara berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta pelibatan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh perlu dilihat sebagai sebuah proses kolaboratif yang menggabungkan aspek teknis, sosial, dan kelembagaan (Malenya, 2016).

Masyarakat memiliki peran sentral dan tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama yang mampu mengenali masalah dan menemukan solusi yang

sesuai. Keterlibatan aktif warga dapat memastikan keberlanjutan upaya penataan permukiman kumuh, karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya (Kiare, 2016). Pemberdayaan masyarakat juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola kawasan mereka sendiri, membangun rasa kebersamaan, serta memunculkan inovasi lokal yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting dan strategis, yang perlu dilakukan beriringan dengan pembangunan fisik (Budiyanto, 2011).

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks penanganan permukiman kumuh terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah pemetaan partisipatif untuk menggali masalah dan potensi di lingkungan tersebut. Tahap kedua, pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan guna menambah pengetahuan dan keterampilan warga (Mutisya dan Mogote, 2024). Tahap ketiga, pembentukan kelompok-kelompok swadaya yang mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan. Keempat, strategi ini perlu mencakup kemitraan antara masyarakat dengan pihak luar seperti pemerintah dan sektor swasta. Kelima, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Keseluruhan langkah-langkah ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan kepemilikan masyarakat terhadap proses Pembangunan (Malenya, 2016).

Penanganan permukiman kumuh memerlukan pendekatan multiaktor yang saling mendukung. Pemerintah berperan sebagai pihak yang menyusun kebijakan, mengatur regulasi, dan menyediakan anggaran pembangunan. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, sektor swasta turut berperan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), misalnya dengan menyediakan pelatihan usaha atau menciptakan lapangan kerja yang produktif (Saleh et al, 2022). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, mendampingi warga secara teknis, serta memperkuat kapasitas dan peran masyarakat itu sendiri. Kolaborasi dari ketiga aktor ini menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk menanggulangi permasalahan permukiman kumuh.

Adapun berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penanggulangan permukiman kumuh. Salah satunya terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurokhman dkk. dalam jurnal berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kawasan Bantaran Sungai Kota Yogyakarta”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan program penataan permukiman sangat bergantung pada kolaborasi dan komitmen antara pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi. Dampak positif dari program tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti meningkatnya akses jalan, tersedianya ruang publik, serta perbaikan kondisi lingkungan secara umum (Nurokhman, dkk. 2023).

Namun demikian, hingga saat ini masih belum banyak ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji secara mendalam peran LSM dalam penanganan permukiman kumuh, khususnya di wilayah Kota Surabaya. Kota Surabaya masih menghadapi tantangan besar terkait keberadaan permukiman kumuh, terutama di kawasan padat penduduk seperti bantaran sungai, tepi rel, dan kampung dalam kota, termasuk Kampung Dupak Magersari. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kekumuhan, seperti melalui pembangunan rumah susun (rusunawa), pelaksanaan program Kotaku, serta regulasi dan rencana strategis berbasis Perda dan SK Wali Kota (Zulyanti, 2017).

Program-program ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan infrastruktur dasar. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain minimnya pendampingan, keterbatasan koordinasi, serta belum

optimalnya pemanfaatan pendekatan berbasis komunitas. Beberapa penelitian telah dilakukan di Kampung Dupak Magersari, terutama mengenai karakteristik kekumuhan dan strategi penataan lingkungan, namun fokus utamanya masih terbatas pada aspek fisik dan partisipasi warga. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kontribusi dan efektivitas peran LSM dalam penataan permukiman kumuh sangat penting dilakukan sebagai dasar pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer sebagai sumber utama. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik semiterstruktur yang dilakukan bersama Koordinator Arkom Jatim, yakni pihak yang telah mendampingi warga Kampung Dupak Magersari dalam proses pemberdayaan. Kampung Dupak Magersari dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan kawasan marginal dengan karakteristik permukiman yang unik, yaitu terletak di sepanjang rel kereta api. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Arkom Jatim, kampung ini berupaya bertransformasi menjadi kampung kota yang tangguh, baik dari aspek ekonomi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim. Data hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji peran dan program yang dijalankan oleh Arkom Jatim, mitra yang terlibat dalam proses pendampingan, serta langkah-langkah pemberdayaan yang telah dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, penelitian ini akan menguraikan peran dan program-program yang telah dilakukan Arkom Jatim dalam menanggulangi permukiman kumuh Kampung Dupak Magersari. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan kawasan kumuh Kampung Dupak Magersari. Ketiga, penelitian ini akan menjelaskan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Arkom Jatim. Ketiga aspek pembahasan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.1 Program Arkom dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh di Kampung Dupak Magersari

Arsitek Komunitas (Arkom) Jatim memulai pendampingan di Kampung Dupak Magersari setelah melalui proses pemetaan awal (*citywide mapping*) terhadap berbagai kampung marginal di Surabaya (Miroslowe, dkk, 2024). Dari 72 kampung pinggir rel yang ditemukan, Kampung Dupak Magersari dinilai paling potensial karena responsivitas dan keterlibatan aktif warganya. Arkom kemudian memfasilitasi pemetaan kampung secara partisipatif, mengadakan *workshop*, dan menyusun perencanaan kampung sebagai upaya menggali visi dan kebutuhan warga terhadap lingkungannya sendiri.

Program-program yang dilakukan oleh Arkom terbagi ke dalam program fisik dan non-fisik. Program fisik yang telah terealisasi salah satunya adalah pembangunan PJU Solar Panel, hasil kolaborasi kelompok warga dengan dukungan Arkom. Inovasi ini didukung oleh kelompok ibu-ibu yang mencari pendanaan melalui produksi lilin aromaterapi, serta kelompok bapak-bapak yang mengembangkan teknologi PJU (Falasifah, dkk, 2024).

Program non-fisik yang signifikan adalah Festival Dolan KapiREL yang bertujuan mengangkat kampung sebagai destinasi wisata lokal. Festival ini menjadi ruang ekspresi warga dan dikelola sepenuhnya oleh komunitas kampung, termasuk pengelolaan dana hasil kegiatan. Hal ini seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“warga di situ ingin kampung mereka menjadi tempat wisata kampung pinggir rel. Nah, di situ perannya Arkom mewadahi dan memfasilitasi itu. Jadi warga sendiri yang menjadi panitianya, dan hasil dari festival itu uangnya warga bagi dan kelola sendiri.”

Selain itu, penguatan ekonomi warga dilakukan melalui pembentukan kelompok tabungan yang saat ini sudah berjumlah tiga kelompok aktif

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan yang lebih luas, Arkom turut mendorong keterlibatan aktif warga Kampung Dupak Magersari dalam program Reformasi Agraria Perkotaan. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk menata ulang kepemilikan dan pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan, tetapi juga untuk mendorong pengakuan atas hak-hak masyarakat miskin kota terhadap ruang hidup yang layak (Pamungkas, dkk, 2024). Dalam hal ini, Kampung Dupak Magersari diposisikan sebagai pilot project untuk pengembangan model perumahan gotong royong, di mana proses perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara partisipatif oleh warga, dengan pendampingan dari Arkom.



Gambar 1. Perencanaan Partisipatif Bersama Warga (uinsa.ac.id, 2024)

Untuk memperkuat posisi warga dalam perjuangan hak atas tanah dan hunian, Arkom memfasilitasi pertemuan antara komunitas Kampung Dupak Magersari dengan komunitas urban lainnya yang menghadapi masalah serupa, serta dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Pertemuan-pertemuan ini menjadi sarana penting untuk membangun solidaritas antarkomunitas dan membuka ruang dialog antara masyarakat akar rumput dengan pembuat kebijakan. Dengan cara ini, warga mulai melihat bahwa persoalan permukiman kumuh bukan sekadar masalah individu, melainkan bagian dari isu struktural yang dapat dihadapi secara kolektif.

Transformasi sosial yang terjadi melalui proses ini mencerminkan perubahan cara pandang dan sikap warga terhadap persoalan yang mereka hadapi. Dari yang semula pasif dan tidak percaya diri, warga menjadi lebih berani menyuarakan haknya dan terlibat aktif dalam proses perencanaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi kampung-kampung lain yang tengah berjuang mendapatkan hak atas tempat tinggal yang legal, nyaman, dan aman.

3.2 Aktor Yang Terlibat dalam Penanggulangan Kawasan Kumuh Kampung Dupak Magersari

Penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kampung Dupak Magersari merupakan hasil dari kolaborasi berbagai aktor dengan peran dan kontribusi yang saling melengkapi. Arsitek Komunitas (Arkom) Jatim menjadi aktor sentral yang berperan sebagai fasilitator utama, yang memprakarsai pendampingan sejak tahap awal pemetaan kampung hingga implementasi program pemberdayaan. Arkom tidak hanya mendampingi secara teknis, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara warga dan aktor eksternal lainnya.

Peran masyarakat lokal dalam proses pemberdayaan yang difasilitasi oleh Arkom sangatlah sentral. Mereka tidak diposisikan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek utama dalam setiap tahapan perubahan yang berlangsung di kampung. Pendekatan ini mencerminkan prinsip partisipatif yang menjadi landasan kerja Arkom, di mana warga diajak untuk secara aktif terlibat dalam merumuskan masa depan lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Dalam konteks ini, beberapa tokoh warga memiliki kontribusi yang menonjol dalam mendorong keterlibatan kolektif dan mengorganisasi komunitas dari dalam.

Tokoh-tokoh seperti Bu Nikmah, Mas Candra, dan Pak Kholis memainkan peran strategis sebagai penggerak komunitas atau *community rider*. Mereka menjadi jembatan antara Arkom dan warga, sekaligus penghubung antarwarga dalam menyampaikan aspirasi dan merancang kegiatan bersama. Tugas mereka tidak terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti membangun kesadaran kritis warga terhadap hak atas perumahan dan pentingnya kerja kolektif. Para penggerak ini terlibat langsung dalam penyusunan rencana tahunan kampung yang melibatkan berbagai aspek kebutuhan lokal, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penguatan ekonomi komunitas. Seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“Yang jelas, kita menemukan community rider seperti Bu Nikmah, Pak RT, Mas Candra, Pak Kholis. Mereka aktif untuk memaparkan kondisi kampung. Mereka juga turut dalam pengelolaan kelompok tabungan dan aktif melakukan perencanaan tahunan. Warga memanajemen sendiri, Arkom tidak terlalu melakukan intervensi.”

Selain itu, mereka turut mengelola kelompok tabungan komunitas yang berfungsi sebagai instrumen keuangan mikro untuk mendukung berbagai inisiatif warga, sesuai dengan rencana tahunan warga kampung dupak magersari (Mutisya & Mogote, 2024). Kelompok ini juga menjadi sarana pembelajaran bersama tentang pentingnya kemandirian finansial dan solidaritas ekonomi. Dengan demikian, keberadaan warga sebagai aktor utama dalam proses transformasi sosial ini menunjukkan bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika masyarakat dilibatkan secara penuh dan memiliki kontrol atas proses pembangunan yang mereka jalani. Peran para penggerak komunitas menjadi bukti bahwa kekuatan perubahan dapat tumbuh dari akar rumput, asalkan didukung dengan pendekatan yang tepat dan ruang partisipasi yang terbuka.

Meskipun peran utama dalam proses pemberdayaan lebih banyak dijalankan oleh Arkom sebagai fasilitator, keterlibatan pemerintah tetap diusahakan dalam berbagai tahapan, meskipun dengan ruang gerak yang terbatas. Peran yang dimainkan oleh pemerintah cenderung bersifat non-fisik dan lebih menekankan pada aspek administratif. Selain itu, keterlibatan pemerintah juga terlihat dalam penyediaan ruang diskusi mengenai pengembangan rumah yang adaptif terhadap perubahan iklim, sebagai bentuk respons terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi masyarakat di kawasan padat perkotaan.

Dalam hal ini, peran pemerintah tidak hanya penting dari sisi teknokratis, tetapi juga dari segi legitimasi politik yang dapat memperkuat posisi komunitas dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup yang layak. Meski demikian, tanggapan dari pihak pemerintah kerap kali bersifat normatif, terbatas pada pemenuhan prosedur atau pelaksanaan kegiatan formal, dan belum menyentuh akar persoalan struktural yang dihadapi masyarakat miskin kota. Hal ini seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“Respon pemerintah sendiri memberi respon formalitas. Mereka (pemerintah) nggak bisa kasih bantuan fisik, biasanya bantuan non-fisik. Waktu itu ngomongin soal UMKM, bagaimana bisa mem-follow-up UMKM-UMKM tersebut.”

Arkom menyadari bahwa untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, keterlibatan pemerintah tetap merupakan komponen yang krusial. Oleh karena itu, Arkom terus berupaya menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, sekaligus menciptakan

ruang-ruang kolaboratif yang memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami konteks sosial yang dihadapi masyarakat.

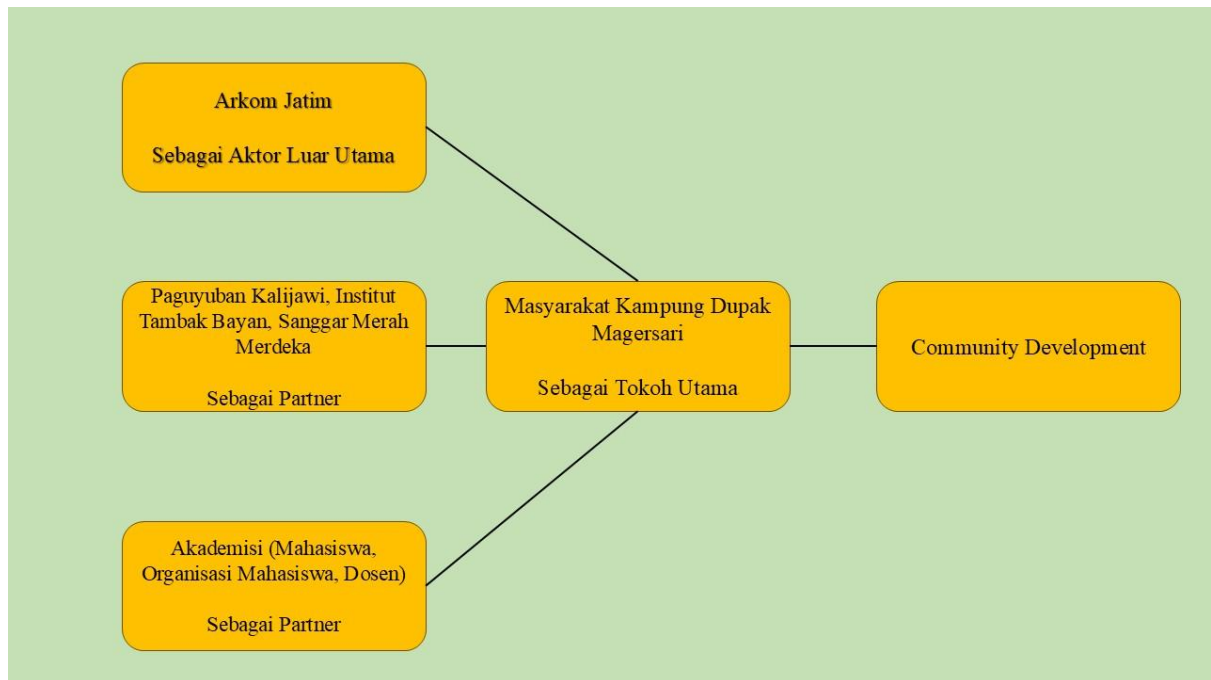
Kontribusi aktor akademik, khususnya mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), turut memperkuat proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Dupak Magersari. Keterlibatan mereka tidak hanya bersifat simbolik, melainkan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam bentuk dukungan keilmuan, teknis, dan partisipatif. Kehadiran komunitas akademik ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan teoritis dan praktik lapangan. Mereka membantu mendokumentasikan dinamika proses pemberdayaan hingga menyusun laporan teknis yang memperluas jangkauan wacana tentang hak atas kota dan permukiman inklusif.

Melalui sinergi antara komunitas dan akademisi, proses perencanaan kampung tidak hanya menjadi lebih komprehensif, tetapi juga memiliki dimensi pendidikan kritis yang mendorong kesadaran kolektif serta memperkuat kapasitas lokal. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari dukungan berbagai aktor, termasuk dunia pendidikan, yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan ke dalam praktik transformasi sosial.

Selain itu, terdapat pula dukungan dari pihak swasta dan donatur yang berkontribusi dalam aspek pendanaan. Dana yang digunakan untuk kegiatan komunitas berasal dari hasil produksi warga (seperti penjualan lilin aromaterapi), sumbangan donasi dalam bentuk dana, tenaga, dan pemikiran, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas lain. Kehadiran komunitas-komunitas dari luar kampung seperti Paguyuban Kalijawi, Institut Tambak Bayan, Sanggar Merah Merdeka yang juga berperan penting dalam membangun solidaritas dan menumbuhkan kepercayaan diri warga. Interaksi antar komunitas dengan pengalaman serupa menciptakan efek psikologis positif bahwa perjuangan mereka tidak dilakukan sendirian. Seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“ya kami mengajak warga untuk bertemu dengan komunitas yang sama, karena yang bisa menguatkan komunitas ya komunitas lainnya. Warga ketemu warga, dengan keprihatinan yang sama. Dengan begitu, lebih ngena dan kegelisahannya dapat dirasakan.”

Menariknya, alur keterlibatan aktor tidak bersifat hierarkis atau birokratis. Pendekatan yang dilakukan Arkom bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan. Mereka memilih untuk memulai langsung dari warga, kemudian perlahan menjembatani akses ke aktor eksternal lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang berhasil adalah yang mampu menempatkan masyarakat sebagai pusat, sementara aktor lain hadir sebagai pendukung dan penguat kapasitas.



Gambar 2. Skema Community Development Arkom Jatim (Analisis Peneliti, 2025)

3.3 Langkah Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Arkom di Kampung Dupak Magersari

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Arkom Jatim di Kampung Dupak Magersari dilaksanakan secara bertahap dengan menitikberatkan pada perubahan cara pandang masyarakat serta peningkatan kapasitas individu dan kolektif warga. Upaya awal yang dilakukan adalah mematahkan pola pikir lama yang membuat warga cenderung bersikap pasif dan enggan terlibat dalam pembahasan isu-isu krusial, seperti status keamanan tempat tinggal maupun kemungkinan relokasi. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan psikologis yang cukup kuat di kalangan masyarakat, di mana banyak warga merasa takut untuk menyuarakan aspirasinya. Ketakutan ini sebagian besar muncul karena kekhawatiran akan dianggap menentang otoritas, baik dari pihak pemerintah maupun PT KAI selaku pemilik lahan rel yang telah lama mereka tempati, seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“mereka masih sensitif dan ada rasa takut ketika membahas mengenai tempat tinggal mereka, mereka masih menganggap, jangan membangunkan singa yang sedang tidur. padahal singanya tidak tidur dan malah menunggu kami tertidur baru mereka bertindak”

Tantangan ini menjadi fokus penting dalam tahap awal pemberdayaan, mengingat perubahan sosial tidak dapat berlangsung tanpa adanya keberanian warga untuk mulai menyuarakan hak-haknya secara kolektif. Untuk mengatasi hal ini, Arkom mengajak warga terlibat dalam dialog dengan komunitas-komunitas lain yang menghadapi situasi serupa, sehingga tercipta rasa solidaritas dan keyakinan bahwa perjuangan mereka bukanlah hal yang sia-sia.

Langkah selanjutnya adalah pembentukan kelompok-kelompok kecil berbasis minat dan kepercayaan, seperti kelompok tabungan dan kelompok usaha ibu-ibu. Strategi ini dipilih karena membangun kepercayaan sosial di lingkungan marginal tidak dapat dilakukan secara instan. Melalui kelompok-kelompok kecil ini, warga perlahan terbiasa bekerja sama, belajar berbagi peran, dan mulai menyusun perencanaan jangka pendek dan menengah. Arkom kemudian memfasilitasi proses pemetaan partisipatif untuk menggali potensi dan permasalahan yang ada di kampung. Hasil dari pemetaan ini dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan kampung yang disepakati bersama oleh warga. Hal ini seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“Kita bikin pemetaan kampung, kemudian dibuat workshop juga bersama kawan kawan lainnya, kemudian bikin perencanaan kampung. Dari perencanaan kampung tersebut mereka (warga) jadi tahu mereka mau ngapain dan apa yang mereka butuhkan”

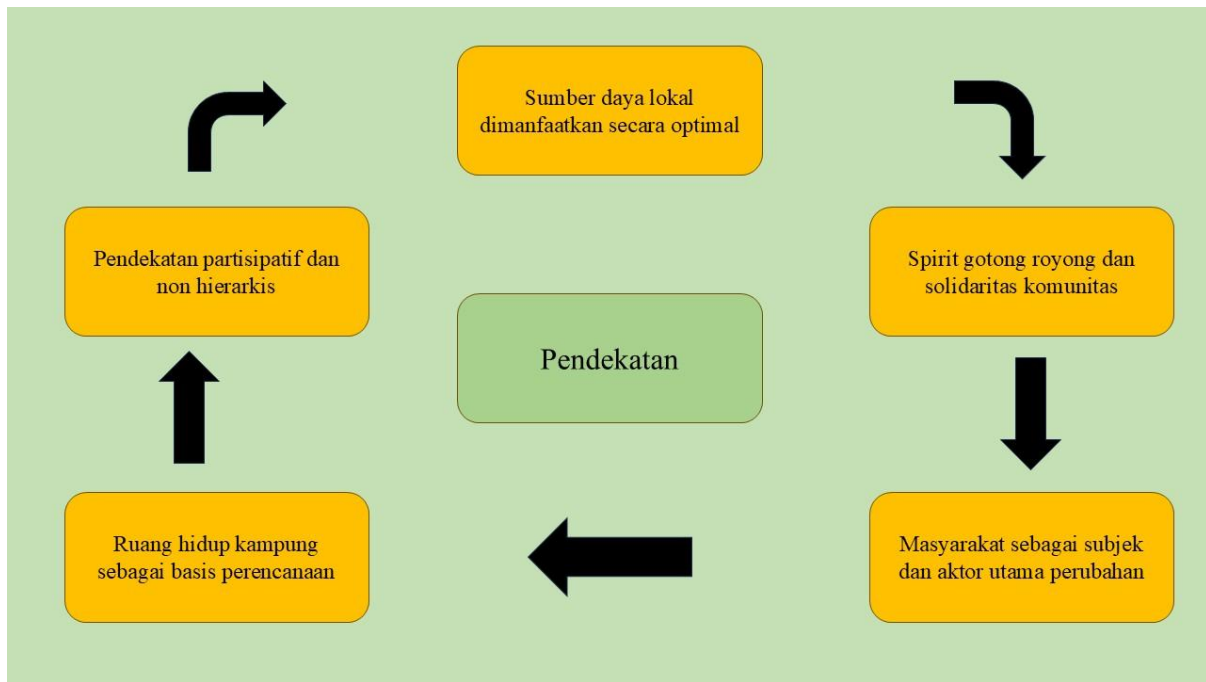
Sebagai upaya konkret, Arkom bersama warga menyusun rencana tahunan yang berisi target-target kegiatan komunitas, seperti pengembangan ekonomi, kegiatan seni budaya, serta perbaikan lingkungan. Rencana ini menjadi tolok ukur pelaksanaan program pemberdayaan dan digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif. Evaluasi dilakukan dengan meninjau apakah rencana tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan bersama.



Gambar 3. Sekolah Arkom Surabaya (www.arkomindonesia.id, 2022)

Salah satu metode yang digunakan Arkom untuk menjaga semangat warga adalah dengan merayakan capaian-capaian kecil. Contohnya adalah perayaan setelah terbentuknya kelompok tabungan atau keberhasilan menyelenggarakan festival kampung. Perayaan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol bahwa perubahan itu mungkin dan telah dimulai. Ini juga memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap proses pembangunan kampung mereka. Seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“dan ketika warga sudah berhasil menjalankan program 1 tahunan mereka, Arkom selalu merayakan kemenangan kecil yang dilakukan oleh warga. Contohnya, setelah warga bisa membuat kelompok tabungan, hal itu dirayakan, membuat momen seperti itu. Dengan merayakan kemenangan kecil tersebut bisa menjaga api semangat warga”

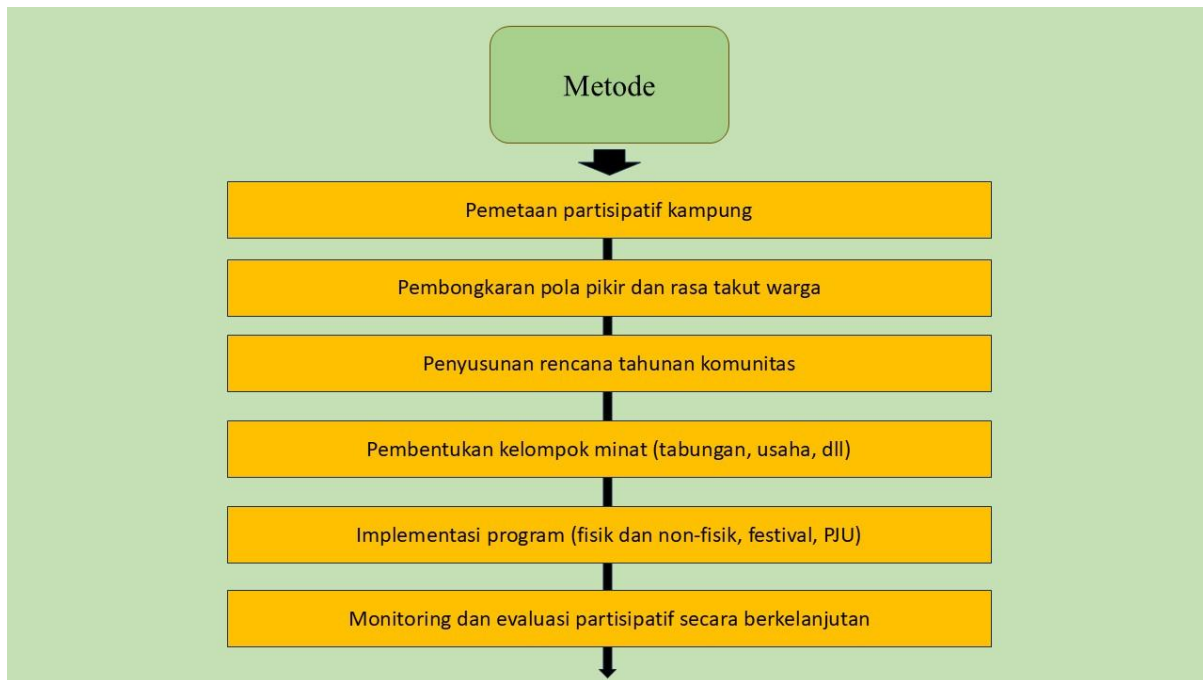


Gambar 4. Skema Pendekatan Arkom Jatim (Analisis Penulis, 2025)

Pendekatan yang diterapkan oleh Arkom cenderung menitikberatkan pada konsep *empowerment* atau pemberdayaan, bukan pada model pembangunan konvensional yang kerap dibatasi oleh tenggat waktu serta tolok ukur yang bersifat kuantitatif. Dalam kerangka pemberdayaan ini, proses yang dijalankan bersifat jangka panjang dan lebih menekankan pada perubahan mendasar dalam pola pikir, perilaku, serta peningkatan kapasitas warga secara bertahap. Arkom memandang bahwa transformasi sosial yang berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui pendekatan yang instan atau sekadar mengejar output formal. Karena itu, mereka menyadari bahwa proses pemberdayaan harus berjalan secara alami, mengikuti ritme kesiapan masyarakat, dan tidak bisa dipaksakan atau diburu oleh target yang kaku. Hal ini seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“Yang jadi kendala dalam proses penguatan warga (pemberdayaan) adalah beda antara development dan empowerment. Kalau development ditargetkan waktu, seluruh target harus cepat sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan empowerment kita merubah perilaku, dan itu tidak segampang itu. Apalagi ini tidak ada trigger yang kuat.”

Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya keterlibatan yang lebih tulus dan partisipatif dari warga, yang menjadi fondasi penting bagi perubahan yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka bergerak bersama kelompok warga yang siap terlebih dahulu, sembari menunggu kesadaran kelompok lainnya tumbuh secara alami. Pendekatan ini memungkinkan proses pemberdayaan berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 5. Skema Metode Arkom Jatim (Analisis Penulis, 2025)

Secara keseluruhan hasil penelitian ini selaras dengan temuan Sadia S. Sara dan Md. Roni Mridha (2021) yang menyoroti peran signifikan LSM dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin kota melalui intervensi program, terutama mikro kredit, pelatihan kerja, dan layanan dasar. Meskipun konteksnya berbeda di mana studi Sara dan Mridha berfokus pada skema ekonomi individual di kawasan kumuh Dhaka, sementara penelitian ini menitikberatkan pada transformasi spasial dan kolektif keduanya menekankan pentingnya kehadiran LSM sebagai katalisator perubahan sosial.

Dalam studi Sara dan Mridha, keterlibatan LSM terbukti meningkatkan pendapatan (44,4%), kesadaran sosial (11%), dan status sosial ekonomi warga (22%). Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemberdayaan yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, seperti yang dilakukan oleh Arkom Jatim, mampu membentuk solidaritas kolektif, perubahan yang lebih baik pada kehidupan ekonomi, serta mendorong keterlibatan warga dalam proses transformasi lingkungan permukiman mereka. Dalam hal ini keberhasilan penanganan kawasan kumuh sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif aktor non-pemerintah yang memahami dinamika lokal dan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sistem yang lebih besar seperti LSM dan fasilitator komunitas.

4. Kesimpulan dan Saran

Strategi pemberdayaan masyarakat oleh Arkom Jatim di Kampung Dupak Magersari menunjukkan pendekatan yang holistik, bertahap, dan berakar pada kebutuhan warga. Pendekatan ini bukan hanya berhasil membangun kapasitas teknis, tetapi juga mentransformasi pola pikir masyarakat dari pasif menjadi aktif dan kolektif dalam merespons isu kekumuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas memiliki potensi besar sebagai strategi penanggulangan permukiman kumuh yang inklusif dan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa kolaborasi lintas aktor terutama antara LSM, pemerintah, akademisi, dan warga perlu difasilitasi secara setara dan partisipatif. Pemerintah daerah dapat mengadopsi pendekatan serupa ke dalam kebijakan formal agar proses pemberdayaan tidak bergantung pada inisiatif komunitas semata. Di sisi lain, pendekatan Arkom dapat direplikasi oleh LSM lain sebagai model praktik baik dalam pembangunan

berbasis komunitas. Secara akademis, temuan ini memperkuat pentingnya studi-studi kolaboratif yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif, sosiologis, dan spasial dalam menelaah praktik pembangunan kota yang adil. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan komunitas lokal juga dapat menjadi jembatan penting dalam memperluas pengetahuan kontekstual dan berbasis lapangan. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi jangka panjang terhadap dampak pemberdayaan komunitas terhadap transformasi sosial dan kesejahteraan warga. Selain itu, studi komparatif di wilayah kumuh lain dengan karakteristik berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor keberhasilan maupun tantangan dalam menerapkan pendekatan serupa di konteks lokal yang beragam.

5. Daftar Pustaka

- Malenya, R. M. (2016). *Influence of non-governmental organizations initiatives on poverty alleviation: Case of Innovations for Poverty Action in Sinai Slums, Nairobi County, Kenya* [Master's thesis, University of Nairobi].
- Budiyanto, H. (2011). Pendampingan dalam proses perencanaan partisipatif program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK). *Local Wisdom*, 3(1), 34–40.
- Saleh, A., Mujahiddin, M., & Gunawan, M. D. (2022). Optimizing corporate social responsibility funds for community empowerment and regional planning in urban slums. *International Journal Reglement & Society*, 3(3), 203–209.
- Zulyanti, D. (2017). *Implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Mutisya, J. K., & Mogote, C. (2024). Non-governmental organizations' development interventions and community empowerment in Kitui County, Kenya. *Journal of Policy and Development Studies*, 3(1), 1–14.
- Kiarie, E. W. (2016). *Challenges of sustainable poverty eradication strategy implementation and performance of non-governmental organizations in urban slums in Nairobi County, Kenya* [Master's thesis, University of Nairobi].
- Pujayanti, D. A. L., Prasetyo, K., & Prasetya, S. P. (2023). Evaluasi Permukiman Kumuh di Sekitar Rel Kereta Api Dupak Magersari Kelurahan Jepara Surabaya. *Dialektika Pendidikan IPS*, 3(3), 140–148.
- Falasifah, N., Syahrazad, S. N. A., & Umamah, R. (2024). Development of Environmentally Appropriate Technology Through Creativity Cooking Oil into Aromatherapy Candles in Dupak Magersari Surabaya. *Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 5(2), 739–749.
- Nurokhman, N., Suharyanto, I., Kristiyanto, H., Erlina, E., Subagyo, S., Suryanto, S., Sukarno, S., Santoso, F. S., & Surifah, S. (2023). Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lingkungan permukiman berbasis komunitas di kawasan bantaran sungai Kota Yogyakarta. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(1), 89–102.
- Pamungkas, A. F., Nugroho, W. H., & Yudiana, B. (2024). Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh pesisir Pekalongan melalui mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 20(2), 81–96.
- Mridha, M. R., & Sara, S. S. (2021). Role of non-government organizations (NGOs) in alleviating poverty from urban slums: A study in Bangladesh. *Interdisciplinary Journal of Applied and Basic Subjects*, 1(1), 29–43.
- Febrianti, M., Erwin, & Jendrius. (2020). Komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Nagari Solok Ambah

Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(3), 850–854.

Budiyanto, H. (2011). Pendampingan dalam proses perencanaan partisipatif program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK). *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Online*, 3(1), 34–40.

Hasanawi, A., Hasanawi, A., & Suryadi, D. (2019). Improvement of community governance to support slum upgrading in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(3), 262–281.

Mehrolhasani, M. H., Yazdi-Feyzabadi, V., & Ghasemi, S. (2021). Community empowerment for health promotion in slums areas: A narrative review with emphasis on challenges and interventions. *Journal of Education and Health Promotion*, 10, 263.

Bhattacharya, S. (2006). Slum dwellers and community development. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 32(3), 213–219.

Ramanath, R., & Ebrahim, A. (2010). Strategies and tactics in NGO–government relations: Insights from slum housing in Mumbai. *Nonprofit Management and Leadership*, 21(1), 21–42.